

OPTIMALISASI BUMDes SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENEKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN POHUWATO

Arwanto Harimas Ginting^{1*}, Sulton Nawawi²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

Email : arwantoharimasginting@ipdn.ac.id

Received: 04-10-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

**Corresponding author*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai satu strategi dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat untuk menekan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu program saja. Perlu berbagai program dan upaya dalam menangani kemiskinan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi pemerintah desa untuk mendapatkan dana dan mengelola sumber daya yang ada di desanya melalui sebuah badan usaha yang disebut BUMDes. Menggunakan metode kualitatif dan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik Analisis Data menggunakan konsep Miles dan Huberman dengan langkah-langkah Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan). Hasil menunjukkan bahwa optimalisasi sebagai sebuah strategi telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwatu. Namun optimalisasi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang manfaat BUMDes masih minim. Ditambah pemahaman pemerintah desa yang seharusnya mampu memberikan dukungan penuh bagi BUMdes masih sangat kurang.

Kata kunci: Strategi; Optimalisasi; BUMDes; Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of Village Owned Enterprises (BUMDes) as a strategy in an effort to improve the community's economy to reduce poverty. Poverty is a problem that cannot be solved by one program alone. Various programs and efforts are needed to deal with poverty. Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for village governments to obtain funds and manage existing resources in their villages through a business entity called BUMDes. Using qualitative methods and conducting interviews, observations and documentation in data collection. The Data Analysis technique uses the Miles and Huberman concept with the steps of Data Reduction (data reduction), Data Display (data presentation) and Conclusion Drawing / Verification (Withdrawal of Conclusions). The results show that optimization as a strategy has been carried out by the Village Community Empowerment Service of Pohuwatu Regency. However, optimization has not run optimally because public knowledge about the benefits of BUMDes is still minimal. In addition, the understanding of the village government that should be able to provide full support for BUMdes is still very lacking.

Keywords : Strategy; Optimization; BUMDes; Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah dan perhatian penting dan harus ditangani segera. Angka kemiskinan terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Merujuk pada data BPS Kabupaten Pohuwato juga mengalami pergerakan naik dari jumlah penduduk yang miskin tahun 2020 berkisar 17,62 persen meningkat menjadi 18,08 persen tahun 2021. Perubahan angka kemiskinan ini harus diantisipasi oleh pemerintah dengan mengupayakan berbagai program dan kegiatan. Secara nasional sudah sejalan poin ketiga Nawacita: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana penelitian Aneta (2012) di Kota Gorontalo, Nazaruddin, Musta'in, & Muafiqie (2017) di Jombang, Sugandi (2016) di Kota Bandung. Selain itu pemerintah juga pernah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang juga dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Soesanta, 2013). Namun penelitian terkait optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum banyak dilakukan.

Pembangunan kawasan perdesaan dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, dan mengoptimalkan sumber

daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya untuk memberikan peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.

Masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dan menetap di wilayah pedesaan. Oleh hal tersebut maka titik pusat pembangunan harus dimulai dari daerah pinggiran atau wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan memiliki arti penting bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, maka usaha untuk mengurangi kesenjangan dapat diwujudkan. Pembangunan pinggiran kota tidak hanya terkait dengan perbatasan dan geografi daerah-daerah negara tetangga, tetapi juga dengan masalah mereka yang tertinggal dari masyarakat dan kurang beruntung secara ekonomi. Daerah pinggiran juga menampilkan keadaan yang masih kurangnya pembangunannya di wilayah tersebut. Hal ini terjadi akibat dampak dari pembangunan yang selama ini berfokus pada kawasan perkotaan yang dianggap sebagai pusat pembangunan.

Pembentukan BUMDes sebagai alat dalam pembangunan Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan kepada masyarakat di desa agar dapat mengelola dan memaksimalkan aset Desa sesuai dengan potensi dan adat kebiasaan masyarakat yang tinggal di Desa. Sebagai proses dalam membangun kekuatan ekonomi dan memandirikan Desa dalam kerangka desa membangun yang tertera dalam Undang-Undang Desa maka desa diberi kewenangan penuh untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan membina BUMDes agar berjalan dan diawasi.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, problematika BUMDes yang tidak berjalan diakibatkan oleh beberapa hal yang mempengaruhinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kepengurusannya tersendiri dalam menjalankan usahanya. Kepengurusan BUMDes yang tidak berjalan secara baik dapat mengakibatkan BUMDes tidak berjalan secara optimal dalam menjalankan usahanya yang kemudian berimbas kepada pendapatan dari BUMDes tersebut yang berkurang. Bukan hanya hal itu saja, kepengurusan BUMDes yang berganti-ganti juga dapat berdampak terhadap kinerja BUMDes. Ketika BUMDes sudah berjalan namun kemudian pengurus BUMDes yang berperan dalam menjalankan BUMDes tersebut digantikan dengan orang yang tidak terlalu paham dengan pengelolaan BUMDes tersebut sehingga berakibat pada pengelolaan BUMDes yang tidak maksimal.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes yaitu mengenai bisnis usahanya yang jalan ditempat karena pemilihan usaha yang tidak maju atau tidak berkembang. Bisnis usaha yang pilih monoton kearah usaha simpan pinjam, namun karena kurangnya identifikasi yang baik sehingga mengakibatkan BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes ditemui kepengurusan yang tidak aktif, seringkali pergantian pengurus dan anggota, tidak memiliki bisnis plan yang tepat atau manajemen usahanya yang tidak sesuai, fokus memilih usaha simpan pinjam. Sehingga perlu penanganan khusus oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pohuwato melakukan optimalisasi BUMDes sebagai strategi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Menguraikan hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka optimalisasi dan upaya lain yang dilakukan.

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian terkait optimalisasi BUMDes dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa pernah dilakukan Muhammad (2019), terkait pembinaan terhadap BUMDes oleh Apriyanti, Endah dan Setiadi (2019) di Kabupaten Ciamis, pengembangan BUMDes Chaniago (2018).

Strategi secara umum dianggap sebagai suatu cara khusus yang dianggap akan membawa keberhasilan dan digunakan untuk merancang sebuah peraturan ataupun kebijakan yang akan dijalankan nantinya. Istilah Strategi berasal dari Bahasa Yunani “Strategis” atau “Strategos” dengan kata jamaknya yaitu Strategi. Pada zaman Athena, Strategos berarti “Komandan Pasukan”. Stephanie mengatakan strategi adalah Suatu proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedarmayanti (2018) mengutarakan “Konsep Strategis sebagai alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai Strategi terus berkembang dan dapat dibuktikan dengan perbedaan konsep terkait Strategi dalam periode 30 tahun terakhir”. Strategi dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari rencana yang ditentukan oleh pemimpin tertinggi yang mempunyai tujuan jangka panjang, diikuti

berbagai tahapan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi merupakan suatu rencana dari tindakan berpengaruh yang akan dilakukan dan menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan terhadap program maupun kebijakan yang akan ataupun telah dilakukan oleh organisasi pemerintah.

Triton (2007) menyatakan bahwa dalam penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi, yaitu:

1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap suatu permasalahan;
2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis;
3. Menyusun perencanaan tindakan;
4. Menyusun rencana pemberdayaan;
5. Mempertimbangkan keunggulan;
6. Mempertimbangkan yang berkelanjutan.

Sondakh, Sambiran, & Kimbal (2019) berpendapat optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pandangan lain oleh Sidik (2001:8) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan, sementara Winardi(1999), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan.

Penelitian bagaimana optimalisasi BUMDes melalui OVOP (One Village One Product) Ardiansyah, Firdaus, & Muhtadi (2021), peningkatan potensi desa melalui optimalisasi BUMDes (Farrah, Prayitno, Arizkha, Nur, & Alfisyah, 2021), optimalisasi BUMDes dengan pemanfaatan

sampah (Naibaho, Panjaitan & Napitupulu, 2021, Setyaningrum, & Sari, 2022).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 sampai pasal 90 dan turunannya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi payung hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peraturan tersebut memuat tujuan pembentukan BUMDes/BUMDes bersama, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan induktif untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga dalam menggambarkan fenomena yang diamati dapat berdasarkan

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber Data dibagi menjadi 2 yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang terlebih dahulu diolah. Informan dikategorikan menjadi 2 kelompok yakni dari unsur pemerintah daerah dan pengurus BUMDes. Ditentukan secara *Purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Perkembangan Ekonomi Masyarakat dan Sarana Prasarana Perdesaan, Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Peneliti sebagai instrumen penelitian menggunakan alat bantu pada proses observasi dan wawancara pada pengumpulan data dan informasi berupa alat-alat dokumentasi, buku catatan, perekam video, perekam suara, dan dalam dokumentasi saat pengumpulan gambar, foto, dokumen, serta arsip yang berkaitan dengan strategi mengoptimalkan BUMDes di Kabupaten Pohuwato. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan konsep Miles dan Huberman dengan langkah-langkah Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan).

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Pohuwato terletak di sebelah barat Kota Gorontalo, Ibukota dari Provinsi Gorontalo, tepatnya 150 km dari pusat Kota. Struktur dataran di Kabupaten Pohuwato yaitu dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 143,8 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah 4.244,31 atau 35,83% dari total luas Provinsi Gorontalo. Pohuwato dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo. Namun kemudian, melalui undang-undang nomor 6 tahun 2003, Pohuwato secara resmi memekarkan diri dari Kabupaten Boalemo dan menjadi daerah otonom baru. Sejak dimekarkan, di Kabupaten Pohuwato telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terutama dibidang pemerintahan, dimana awal pemekaran Kabupaten Pohuwato hanya terdiri dari 5 Kecamatan dan sekarang dalam kurun waktu 2003-2021 sudah ada 13 Kecamatan yang berdiri di Kabupaten Pohuwato.

Salah satu pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan pembentukan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Berikut ini merupakan data tentang jumlah BUMDes yang aktif dan tidak aktif di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 1
Data BUMDes aktif dan tidak aktif

Kecamatan	Bumdes Aktif	Bumdes Tidak Aktif
Buntulia	2	5
Dengilo	4	1
Duhiadaa	3	5
Lemito	2	6
Marisa	2	5
Paguat	4	4
Patilanggio	3	3
Popayato	7	3
Popayato Barat	3	3
Popayato Timur	4	3
Randangan	4	9
Taluditi	4	3
Wanggarasi	3	4
Jumlah	44	54

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Pohuwato terdiri dari 101 Desa, serta memiliki 3 Kelurahan berada di Kecamatan Paguat. Setiap Desa maupun Kelurahan yang berada di Kabupaten

Pohuwato, secara administratif terdiri dari beberapa dusun. Kecamatan dengan jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Randangan.

Tabel 2
Jumlah Desa/Kelurahan/UPT/Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Desa	Kel	UPT	Dusun
1	Popayato	10	-	-	36
2	Popayato Barat	7	-	-	22
3	Popayato Timur	7	-	-	25
4	Lemito	8	-	-	29
5	Wanggarasi	7	-	-	24
6	Marisa	8	-	-	29
7	Patilanggio	6	-	-	26
8	Buntulia	7	-	-	30
9	Duhiadaa	8	-	-	33
10	Randangan	13	-	1	57
11	Taluditi	7	-	1	38
12	Paguat	8	3	-	32
13	Dengilo	5	-	-	17
Pohuwato		101	3	2	398

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato 2020

Kondisi Demografis, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato, adalah sebanyak 146.432 jiwa.

Dengan komposisi 74.532 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan 71.900 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jika melihat jumlah penduduk pada tahun 2019 dan

2020, Kabupaten Pohuwato mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen. Selanjutnya untuk angka rasio jenis kelamin atau perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 adalah sebesar 103.6.

Jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 mencapai 34 jiwa/km dengan rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga adalah 3 orang. Kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Pohuwato tersebar di 13 Kecamatan cukup beragam. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Marisa dengan besaran jumlah kepadatan penduduk sebesar 613 jiwa/km sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Popayato Timur dengan besaran kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/km.

Penduduk usia kerja adalah penduduk dengan usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 108.241 jiwa. Sebanyak 78.039 orang diantaranya berstatus sebagai pekerja dan bekerja, sementara itu sebanyak 2.365 orang merupakan pengangguran.

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terletak di Kecamatan Marisa. Peraturan Bupati Pohuwato No 26 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang syarat pendirian

BUMDes diatur dalam pasal 8. Peraturan Bupati Pohuwato nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan mengamanatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Bidang yang menangani hal tersebut yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 269 dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa, salah satu tugasnya yaitu “merumuskan pembentukan dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan serta melakukan penyusunan program/kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa melalui pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDes), usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) serta pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Selanjutnya Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Perdesaan dalam pasal 270, kepala seksi memiliki fungsi yang berkaitan dengan BUMDes yaitu “Memfasilitasi pembentukan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Antar Desa (Bumdes/BUMDes bersama). Menghimpun, mengidentifikasi serta mengolah data yang terkait dengan BUMDes, Bumdes/BUMDes bersama, pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP/UEP) sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan dan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat.”

Strategi berkaitan dengan rencana program jangka panjang dan jangka pendek yang memuat gagasan dan gagasan sebagai solusi atas suatu masalah, kompleksitas dan kompleksitas dalam pemerintahan. Strategi selalu berkaitan dengan pencapaian visi dan misi, namun strategi biasanya lebih terkait dengan tujuan jangka panjang dan jangka panjang. Dengan adanya strategi, pelaksanaan program dapat diperhitungkan berdasarkan kekuatan dan ancaman terhadap pemerintah.

Visi dan Misi

Visi dan misi dalam mengoptimalkan BUMDes di Kabupaten Pohuwato adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitaran BUMDes yang mau dan bersedia untuk mengurus BUMDes dengan seksama agar BUMDes dapat menjalankan usahanya secara optimal. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diutarakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ibu Muzna Giasi, S.Sos mengatakan “visi misi DPMD ini adalah untuk melayani dan memajukan Desa dengan mensejahterakan setiap masyarakat yang berada di lingkungan Desa”. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna DPMD Kabupaten Pohuwato mengatakan bahwa: “Pengetahuan masyarakat Kabupaten Pohuwato tentang pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang ada masih kurang sehingga mengakibatkan

terbengkalainya BUMDes sebagai sarana pengelolaan sumber daya alam.”

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan tujuan dari pengoptimalisasian BUMDes kepada aparatur DPMD yang lainnya serta kepada aparatur Desa. Dengan penyampaian tersebut diharapkan orang-orang tersebut dapat menerima tujuan yang akan dicapai kedepannya. Mulai dengan mengadakan rapat mengenai perkembangan BUMDes di Kabupaten Pohuwato, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa mengenai tujuan dari optimalisasi BUMDes ini, serta melakukan monitoring terhadap kinerja BUMDes. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Sekretaris DPMD sebagai hasil wawancara sebagai berikut “Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mengencangkan strategi dalam mengoptimalkan BUMDes, mengingat BUMDes merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).”

Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Lingkungan merupakan identifikasi tempat dilaksanakannya kegiatan optimalisasi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato. Setelah menetapkan visi dan misi dalam mengoptimalkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis lingkungan. Berdasarkan analisis peneliti dilapangan, diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato belum mampu mengelola sumber daya alam dan teknologi yang ada

dan memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian.

Strategi yang baik adalah strategi yang memperhatikan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi kekuatan atau penghambat dalam mencapai visi dan misi. Lingkungan Internal merupakan lingkungan dimana kepala dinas DPMD mensosialisasikan strategi awal dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes di lingkungan kerja dengan sarannya aparatur sipil Negara di lingkungan kantor DPMD. Lingkungan internal dapat menjadi kekuatan sekaligus hambatan dalam strategi ini. Dapat menjadi kekuatan apabila setiap pegawai yang berada di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menerima keputusan dari atasan dan menjalankan keputusan tersebut dengan baik. Permasalahan yang timbul adalah ketika lingkungan menjadi kendala, artinya adalah ada pesan yang tidak tersampaikan dengan baik serta perlunya perbaikan agar strategi dapat berjalan dengan baik. Lingkungan Eksternal, lingkungan ini berada diluar pemerintah yang memelihara proses keberlangsungan suatu strategi. Lingkungan eksternal tempat berlangsungnya strategi DPMD dalam mengoptimalkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato adalah Kondisi masyarakat, penilaian awal saat strategi akan diterapkan kepada masyarakat juga akan dilihat sebagai perkiraan awal kondisi masyarakat setelah menerima strategi. Berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan tentang usaha dan kinerja BUMDes, masyarakat hanya mengetahui bahwa BUMDes adalah

pelengkap suatu Desa saja. Hal ini dibuktikan dengan dengan beberapa pernyataan warga masyarakat yang mengatakan bahwa BUMDes hanya pelengkap pemerintahan Desa saja dan tidak mengetahui fungsi dari BUMDes tersebut. Koordinasi dengan instansi vertikal lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdapat koordinasi antar kepala daerah dengan instansi vertikal yang mewakili daerah. Terkait strategi dalam mengoptimalkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pemerintah Desa, sehingga diperlukan koordinasi jangka panjang agar upaya mengoptimalkan BUMDes dapat terus berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan strategi DPMD dalam mengoptimalkan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pohuwato diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah Desa guna mempermudah dalam mengkoordinir pengurus BUMDes dalam merealisasikan strategi tersebut.” Koordinasi dengan instansi vertikal merupakan kekuatan lingkungan eksternal dalam dimensi lingkungan yang kemudian akan menjadi keberhasilan dari strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap suatu permasalahan DPMD

Pohuwatu sudah melakukan sosialisasi terkait optimalisasi BUMDes agar terjadi peningkatan dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. DPMD bersama pemerintah Desa menyampaikan optimalisasi BUMDes menjadi sebuah DPMD dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian maka aparat desa dilingkungan pemerintahan Kabupaten Pohuwato akan menjadi motor penggerak dalam mengoptimalkan BUMDes.

Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis. Tujuan optimalisasi dilakukan terhadap BUMDes yang masih beroperasi dengan baik. Sementara BUMDes yang sudah tidak berjalan dilakukan penelusuran ulang apakah akan dihilangkan dengan pembentukan BUMDes baru.

Menyusun perencanaan tindakan, DPMD secara berkala memberikan pemahaman terkait optimalisasi BUMDes dalam jangka panjang akan membantu perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan bisa terkendali. Program-program yang tercapai yaitu sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya BUMDes untuk bekerja secara optimal, tercapainya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan aparat Desa terkait optimalisasi BUMDes, dan monitoring terhadap BUMDes.

Menyusun rencana pemberdayaan, DPMD bergerak bersama para camat dan seluruh pemerintah desa dalam mendampingi BUMDes agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Mempertimbangkan keunggulan, DPMD mengarahkan agar BUMDes membentuk unit usaha yang memiliki keunggulan tersendiri. Sehingga dapat bersaing di tingkat yang lebih luas lagi. Mempertimbangkan yang

berkelanjutan, BUMDes harus terus berbenah agar unit usahanya dapat berkembang dan berkelanjutan. Untuk dapat menopang perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Dalam mengoptimalkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato masih belum maksimal karena rendahnya pengetahuan masyarakat, masyarakat Kabupaten Pohuwato pada umumnya mengetahui tentang BUMDes. Disamping itu kurang mampu mengelola potensi desa. Peran pemerintah Desa sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan BUMDes masih sangat kurang terutama dalam mengawasi kinerja BUMDes. Sehingga kegiatan usaha BUMDes tidak maksimal bahkan cenderung jalan ditempat tanpa adanya kemajuan yang berarti. Pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak transparan mengakibatkan ada peluang penggelapan dana BUMDes. Kurang memperhatikan keperluan belanja dan penghasilan mengakibatkan BUMDes mengalami kerugian. Selain pengelolaan keuangan yang kurang baik, kurangnya modal juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalnya kinerja BUMDes. Manajemen usaha BUMDes belum memiliki bisnis plan yang tepat dan sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalankan.

Upaya yang dilakukan oleh DPMD dalam mengatasi hambatan meningkatkan kepedulian terhadap kinerja bumdes dengan memberikan bantuan berupa dana. Sosialisasi dilakukan secara bertahap guna memberikan pemahaman baru kepada masyarakat dan pengurus bumdes. Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang optimalisasi bumdes dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memberikan pembekalan terhadap pengurus bumdes tentang bagaimana mengelola potensi desa agar dapat menjadi komoditas yang menghasilkan. Memberikan motivasi kepada pengurus bumdes agar lebih semangat dalam menjalankan usaha bumdes tersebut. Melakukan monitoring kepada bumdes yang berada di Kabupaten Pohuwato guna mengevaluasi kinerja bumdes serta mencari tahu hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Monitoring ini rutin dilakukan tiap bulannya sebagai upaya pencegahan terjadinya kendala dalam mengelola bumdes.

KESIMPULAN

Strategi DPMD dalam mengoptimalkan bumdes untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Faktor penghambat strategi DPMD dalam mengoptimalkan bumdes untuk meningkatkan perekonomian antara lain. Rendahnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam mengelola potensi Desa. Kurangnya peran pemerintah Desa dalam mengawasi kinerja bumdes yang kurang maksimal dalam menjalankan usahanya. Pengelolaan keuangan yang bumdes yang tidak transparan sehingga mengakibatkan pengeluaran belanja lebih besar daripada pemasukan yang didapat. Manajemen usaha yang kurang tepat yang berakibat kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan.

SARAN

Optimalisasi BUMDes sebagai sebuah strategi yang dilakukan DPMD perlu dikembangkan lagi melalui bentuk lain strategi yang lebih berguna kedepannya. Faktor penghambat yang menjadi penghalang dalam pencapaian optimalisasi perlu tersu dievaluasi dan diperbaiki dalam pengelolaan BUMDes yang masih berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Naibaho, R., Panjaitan, J., & Napitupulu, A. (2021). Optimalisasi BUMDes dengan Pemanfaatan Sampah Di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31.
- Setyaningrum, R. K., & Sari, Y. K. (2022). Optimalisasi Bumdes Melalui Pengolahan Sampah Rumah Tangga Desa Pandeyan. *Ganesha: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 1-6.
- Nazaruddim, A., Musta'in, M. M., & Muafiqie, H. (2017). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang. *Journal of Public Power*, 1(1), 17-39.
- Sugandi, Y. S. (2016). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 109-128.
- Soesanta, P. E. (2013). Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(2), 73-78.

- Muhammad, A. Y. (2019). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa. (*Studi Kasus Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima*) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Chaniago, R. (2018). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Apriyanti, D., Endah, K., & Setiadi, B. (2019). Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 262-266.
- Stephanie, K. M. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti (2018). *Manajemen strategi ; editor, Nurul Falah Atif*. Bandung Refika Aditama,.
- Triton, PB. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnership dan Kolektivitas*. Yogyakarta : Tugu Publisher
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Farrah, A. I., Prayitno, G., Arizkha, Y. F., Nur, Z. A., & Alfisyah, B. D. (2021). Strategi Transformasi Desa Jimbaran Menuju Desa Mandiri Melalui Pengolahan Kopi Dan Optimalisasi Bumdes. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 32-44.
- Sondakh, R. W., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2019). Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Machfud Sidik. 2001. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah"
- Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- <https://sulsel.suara.com/read/2022/02/13/151251/jumlah-warga-miskin-kabupaten-pohuwato-meningkat-akibat-pandemi-covid-19>
- BPS Kabupaten Pohuwato <https://pohuwatokab.bps.go.id/indikator/23/118/1/indikator-kemiskinan.html> Diakses 04 Oktober 2022 Pukul 09:55 WIB



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).